

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu		
Tahun Penilaian	: 2026		
Prode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025- 2029		
urusan pemerintah	: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		
OPD yang dinilai	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu		
Sumber Data	Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2029		
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya daya saing industri dan nilai tambah perdagangan melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya daya saing industri		
	2. Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan		
IKU Renstra OPD	NO	IKU	2026
	1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	2,50%
	2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,70%
Informasi Lain			
Tujuan, Sasaran, IKU, yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis 1. Meningkatnya daya saing industri dan nilai tambah perdagangan melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien Sasaran Strategis 1. Meningkatnya daya saing industri 2. Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan IKU Strategis 1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		

Bengkulu, 31 Januari 2026
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu


DESMAN SIBORO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700110 201001 1 003

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu		
Tahun Penilaian	: 2026		
Prode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2026- 2029		
urusan pemerintah	: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		
OPD yang dinilai	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu		
Sumber Data	Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2026		
Tujuan Srtategis	1. Meningkatnya daya saing industri dan nilai tambah perdagangan melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien		
Program OPD dan Kegiatan Utama	Program	: Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
	Kegiatan	: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
	Program	: Program Pengendalian Izin Usaha industri	
	Kegiatan	: Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan	
	Program	: Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
	Kegiatan	: Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
	Program	: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Kegiatan	: Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
	Program	: Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
	Kegiatan	: Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang	
	Program	: Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
	Kegiatan 4.1	: Terlaksananya pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Seluruh daerah kabupaten/kota	
	Kegiatan 4.2	: Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
	Program	: Program Pengembangan Ekspor	
	Kegiatan	: penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam provinsi	
Keluaran/Hasil Kegiatan	NO	Indikator Keluaran	Target
	1	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi	1 dokumen
	2	mlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinaan Usaha dan Pengawasan	1 dokumen
	3	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen
	4	Jumlah Unit Usaha Baru IKM	150 Unit
	5	Jumlah Pusat Distribusi Provinsi yang dibangun dan di Kelola	1 Unit
	6	Jumlah infomasi harga dan stok Bapokting	12 dokumen
	7	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	10 Jumlah
	8	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	8 Produk
	9	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang	4 Dokumen
Informasi Lain		-	

Kegiatan dan Indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	Kegiatan Terlaksananya pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Seluruh daerah kabupaten/kota
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam provinsi

Bengkulu, 31 Januari 2025
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu


DESMAN SIBORO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700110 201001 1 003

**IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Bengkulu								
Perangkat Daerah		: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu								
Tahun Penilaian		: 2026								
Periode yang dinilai		: Periode Renstra Tahun 2025-2030								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya daya saing industri dan nilai tambah perdagangan melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Potensi Menurunnya Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	RSO.26.31.23.01	Kepala Dinas	Penurunan kualitas bahan baku industri pengolahan (TBS sawit buah matang busuk), Menurunnya permintaan buyer untuk ekspor CPO, sehingga jumlah produksipun turun	Eksternal	UC	Semakin Menurunnya PAD Provinsi Bengkulu dari sektor industri	Masyarakat, Petani dan Pelaku Usaha Industri
	- Meningkatnya Meningkatnya daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Potensi Jumlah perusahaan industri pengolahan tidak bertambah	RSO.26.31.23.02	Kepala Dinas	Semakin Terbatasnya Lahan/Lokasi Untuk Pembangunan Industri pengolahan yang ada dan belum terbentuknya kawasan industri	Eksternal	UC	Semakin Menurunnya Kinerja Pelaku Usaha Industri yang ada	Pelaku Usaha
	- Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Potensi menurunnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	RSO.26.31.23.03	Kepala Dinas	Inflasi harga yang tidak didukung daya beli masyarakat. Selain itu komoditi ekspor Provinsi Bengkulu masih dalam bentuk barang mentah seperti cangkang sawit, batubara	Eksternal	UC	Menurunnya kinerja perdagangan Provinsi Bengkulu	Masyarakat, pedagang besar dan eceran dan pelaku ekspor

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERGANGAN PROVINSI BENGKULU

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bengkulu
 Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
 Tahun Penilaian : 2026
 Prode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025- 2029
 urusan pemerintah : Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan: Meningkatnya daya saing industri dan nilai tambah perdagangan melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.01	Kepala Dinas	Tidak adanya pembangunan dan pengembangan industri baru dan existing dan belum adanya hilirisasi industri pengolahan	eksternal	UC	Nilai investasi dan proses produksi industri tidak mencapai target	Pelaku Usaha Industri
	Sasaran 1: Meningkatnya Meningkatnya daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Menurunnya Rasio PDRB Industri Pengolahan	RSO.26.31.23.02	Kepala Dinas	belum adanya hilirisasi industri pengolahan yang memberi nilai tambah produk industri pengolahan selain CPO	eksternal	UC	Proses dan nilai produksi industri pengolahan tidak mencapai target yang di tetapkan	Pelaku Usaha Industri

2	Tujuan: Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.03	Kepala Dinas	Kenaikan harga yang tidak diimbangi kenaikan penghasilan masyarakat. Selain itu komoditi ekspor provinsi Bengkulu masih dalam bentuk barang mentah seperti cangkang sawit, batubara	eksternal	UC	Menurunnya daya beli masyarakat dan belum adanya nilai tambah perdagangan produk ekspor	Pelaku usaha perdagangan besar, eceran, pelaku ekspor dan masyarakat
---	----------------------------------	---	--	-----------------	--------------	---	-----------	----	---	--

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Perangkat Daerah	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2026
Prode yang dinilai	: Periode Renja Tahun 2026
urusan pemerintah	: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

[illegible]

[illegible]

Sub Kegiatan: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Pelaksanaan	Kurangnya pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan banyak beredar barang yang tidak ada SNI	ROO.26.30.23.11	PPTK	Keterbatasan jumlah produk yang dipantau dan Kurang kesadaran pedagang untuk menjual produk-produk yang sudah SNI	Internal	C	Kurang optimalnya pengawasan barang beredar sehingga masih banyak produk yang tidak ber SNI beredar di masyarakat	Masyarakat
Kegiatan: Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										
Sub Kegiatan: Terselenggaranya Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penatausahaan	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan	ROO.26.30.23.12	PPTK	Kurangnya perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Kas pada Kegiatan	Internal	C	terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan masa kadaluarsa sertifikat kalibrasi	Pengelola Kegiatan
Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Perencanaan Anggaran	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan	ROO.26.30.23.13	PPTK	Kurangnya anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan yang mengolah komoditi unggulan	Internal	C	Jumlah komoditi unggulan yang diuji terbatas dan sertifikat yang diterbitkan juga sedikit	OPD dan Perusahaan yang mengelola komoditi unggulan
Sub Kegiatan: Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Perencanaan Anggaran	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji	ROO.26.30.23.14		Kurangnya anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji			Jumlah komoditi unggulan yang diuji terbatas dan sertifikat yang diterbitkan juga sedikit	OPD dan Perusahaan yang mengelola komoditi unggulan
Program Pengembangan Ekspor										
Kegiatan: penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam provinsi										
Sub Kegiatan: Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Perencanaan Anggaran	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.30.23.15	PPTK	kurangnya anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Internal	C	Pelaku usaha ekspor yang mendapat fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan sangat terbatas	Pelaku Usaha Industri, Pelaku usaha pertambangan dan peternak berbasis ekspor
Sub Kegiatan: Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Terlaksananya pameran Dagang	Perencanaan Anggaran	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.30.23.16	PPTK	kurangnya anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	Internal	C	Pelaku usaha ekspor yang mendapat fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan sangat terbatas	Pelaku Usaha Industri, Pelaku usaha pertambangan dan peternak berbasis ekspor

ANALIS RISIKO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERGANGAN PROVINSI BENGKULU

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2026
Prode yang dinilai	: Periode Renja Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah
urusan pemerintah	: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Sekala Kemungkinan	Sekala Risiko (6= 4X5)
1	2	3	4	5	(6= 4X5)
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Potensi Menurunnya kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	RSO.26.31.23.01	3	3	9
2	Potensi Jumlah perusahaan industri besar tidak bertambah	RSO.26.31.23.02	3	3	9
3	Potensi menurunnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	RSO.26.31.23.03	3	3	9
II.	Risiko Strategis OPD				
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.01	3	3	9
	Rasio PDRB Industri Pengolahan rendah	RSO.26.31.23.02			
4	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.03	3	3	9
III.	Risiko Operasional OPD				
1	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.01	2	4	8
2	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.02	2	4	8
3	Lambatnya Pelaporan dan update data IKM oleh Disperindag Kabupaten/Kota	ROO.26.31.23.03	2	4	8
4	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data IKM di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.04	2	4	8
5	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.05	2	4	8
6	Lambatnya Pelaporan dan update data Perusahaan pada Aplikasi SIINas	ROO.26.31.23.06	2	4	8
7	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data Perusahaan Sedang Besar di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.07	2	4	8
8	Belum adanya pasar lelang Komoditas di Provinsi Bengkulu dan tidak ada data Pengguna Pasar Lelang Komoditas	ROO.26.31.23.08	3	4	12
9	Lambatnya Pelaporan dan update data harga Bapakting yang disampaikan petugas dari Dinas Perdagangan Kab/kota	ROO.26.31.23.09	2	4	8
10	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan padahal kegiatan sudah terjadwal	ROO.26.31.23.10	2	3	6
11	Kurangnya pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan banyak beredar barang yang tidak ada SNI	ROO.26.31.23.11	2	4	8
12	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan	ROO.26.31.23.12	2	3	6
13	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan	ROO.26.31.23.13	2	3	6
14	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji	ROO.26.31.23.14	2	3	6
15	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.15	2	3	6
16	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.16	2	3	6

**DAFTAR RISIKO PRIORITAS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERGANGAN PROVINSI BENGKULU**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah urusan pemerintah : Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
Resiko Strategis Pemda						
1	Potensi Menurunnya kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	RSO.26.31.23.01	9	Pemda Provinsi	Penurunan kualitas bahan baku industri pengolahan (TBS sawit buah matang busuk), Menurunnya permintaan buyer untuk ekspor CPO, sehingga jumlah produksipun turun	Semakin Menurunnya PAD Provinsi Bengkulu dari sektor industri
2	Potensi Jumlah perusahaan industri besar tidak bertambah	RSO.26.31.23.02	9	Pemda Provinsi	Semakin Terbatasnya Lahan/Lokasi Untuk Pembangunan Industri pengolahan yang ada dan belum terbentuknya kawasan industri Pelabuhan Pulau Baii	Semakin Menurunnya Kinerja Pelaku Usaha Industri yang ada
3	Potensi menurunnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	RSO.26.31.23.03	9	Pemda Provinsi	Inflasi harga yang tidak didukung daya beli masyarakat. Selain itu komoditi ekspor Provinsi Bengkulu masih dalam bentuk barang mentah seperti cangkang sawit, batubara	Menurunnya kinerja perdagangan Provinsi Bengkulu
I. Risiko Strategis OPD						
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.01	9	Kepala Dinas	Tidak adanya pembangunan dan pengembangan industri baru dan existing dan belum adanya hilirisasi industri pengolahan	Menurunnya kapasitas Produksi Petani, Pelaku Usaha Industri, Pertambangan dan peternakan berbasis ekspor
2	Menurunnya Rasio PDRB Industri Pengolahan	RSO.26.31.23.02	9	Kepala Dinas	belum adanya hilirisasi industri pengolahan yang memberi nilai tambah produk industri pengolahan selain CPO	Menurunnya kapasitas Produksi Petani, Pelaku Usaha Industri, Pertambangan dan peternakan berbasis ekspor
3	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.03	9	Kepala Dinas	Kenaikan harga yang tidak diimbangi kenaikan penghasilan masyarakat. Selain itu komoditi ekspor provinsi Bengkulu	Nilai investasi dan proses produksi industri tidak mencapai target
II. Risiko Operasi OPD						
1	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.01	8	Kepala Dinas	kurangnya anggaran untuk pengawasan dan pengambilan data di lapangan akibat	terhambatnya proses pelaksanaan penyusunan dokumen
2	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.02	8	Kepala Dinas	kurangnya anggaran untuk pemantauan dan pengambilan data di lapangan akibat dari efisiensi anggaran	terhambatnya proses pelaksanaan penyusunan dokumen
3	Lambatnya Pelaporan dan update data IKM oleh Disperindag Kabupaten/Kota	ROO.26.31.23.03	8	Kepala Dinas	Dokumen Pendukung belum tersedia secara tepat waktu	Proses Pelaporan menjadi terhambat untuk disampaikan
4	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data IKM di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.04	8	Kepala Dinas	Kurangnya anggaran untuk pemantauan ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu. Selain itu Kabupaten Kota kurang personal pengumpul data serta tidak ada anggaran pengumpulan data base IKM	Kurang optimalnya pemantauan Data IKM tidak terupdate pada SIINas, sehingga tidak optimal dalam penentuan strategi kebijakan industri Kecil Menengah di Provinsi Bengkulu
5	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.05	8	Kepala Dinas	kurangnya anggaran untuk pengawasan dan pengambilan data di lapangan akibat dari efisiensi anggaran, serta lambatnya perusahaan mengupdate data di SIINas untuk pemantauan habis masa berlaku izin perusahaan Industri Sedang Besar	terhambatnya proses pelaksanaan penyusunan dokumen
6	Lambatnya Pelaporan dan update data Perusahaan pada Aplikasi SIINas	ROO.26.31.23.06	8	Kepala Dinas	Dokumen Pendukung belum tersedia secara tepat waktu	Proses Pelaporan menjadi terhambat untuk disampaikan
7	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data Perusahaan Sedang Besar di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.07	8	Kepala Dinas	Kurangnya anggaran untuk pemantauan ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu. Selain itu Kabupaten Kota kurang personal pengumpul data serta tidak ada anggaran pengumpulan data base Perusahaan Sedang Besar	Kurang optimalnya pemantauan Data Perusahaan Sedang Besar tidak terupdate pada SIINas, sehingga tidak optimal dalam penentuan strategi kebijakan industri Perusahaan Sedang Besar di Provinsi Bengkulu

8	Belum adanya pasar lelang Komoditas di Provinsi Bengkulu dan tidak ada data Pengguna Pasar Lelang Komoditas	ROO.26.31.23.08	12	Kepala Dinas	Kurangnya anggaran untuk pemantauan dan pengambilan data ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu terkait pelaku usaha yang menggunakan	Kurang optimalnya pemantauan dan pengambilan data ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu terkait pelaku usaha yang menggunakan pasar lelang
9	Lambatnya Pelaporan dan update data harga Bapokting yang disampaikan petugas dari Dinas Perdagangan Kab/kota	ROO.26.31.23.09	8	Kepala Dinas	Jumlah petugas pemantauan harga Bapokting Terbatas dari Dinas Perdagangan Kab/kota	Terlambatnya update data dan penyampaian laporan data harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
10	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan padahal kegiatan sudah terjadwal	ROO.26.31.23.10	6	Kepala Dinas	Kurangnya perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Kas pada Kegiatan	terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal pasar murah yaitu pada bulan Ramadhan bulan Maret 2026
11	Kurangnya pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan banyak beredar barang yang tidak ada SNI	ROO.26.31.23.11	8	Kepala Dinas	Keterbatasan jumlah produk yang dipantau dan Kurang kesadaran pedagang untuk menjual produk-produk yang sudah SNI	Kurang optimalnya pengawasan barang beredar sehingga masih banyak produk yang tidak ber SNI beredar di masyarakat
12	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan	ROO.26.31.23.12	6	Kepala Dinas	Kurangnya perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Kas pada Kegiatan	terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan masa kadaluarsa sertifikat kalibrasi
13	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan	ROO.26.31.23.13	6	Kepala Dinas	Kurangnya anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan yang mengolah komoditi unggulan	Jumlah komoditi unggulan yang diuji terbatas dan sertifikat yang diterbitkan juga sedikit
14	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji	ROO.26.31.23.14	6	Kepala Dinas	Kurangnya anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji	Jumlah komoditi unggulan yang diuji terbatas dan sertifikat yang diterbitkan juga sedikit
15	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.15	6	Kepala Dinas	kurangnya anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha ekspor yang mendapat fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan sangat terbatas
16	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.16	6	Kepala Dinas	kurangnya anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha ekspor yang mendapat fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan sangat terbatas

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERGANGAN PROVINSI BENGKULU**

No	Kondisi Lingkungan pengendalian yang kurang memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
I.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Pelatihan Peningkatan Kopentensi secara berkala	Kepala Dinas	Tahun 2026
1.				
II.	Komitmen terhadap Kompetensi	Penempatan SDM sesuai dengan basic Pendidikan	Kepala Dinas	Tahun 2026
1.				
III.	Kepemimpinan yang Kondusif	Pelatihan Kepemimpinan	Kepala Dinas	Tahun 2026
1.				
IV.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM	Pelatihan Kepemimpinan	Kepala Dinas	Tahun 2026
V.	Perwujudan dan Peran APIP yang efektif	Pembinaan dari Inspektorat	Kepala Dinas	Tahun 2026
V.	Hubungan kerja Yng baik dengan instansi pemerintah terkait	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait	Kepala Dinas	Tahun 2026

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERGANGAN PROVINSI BENGKULU**

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu	
Tahun Penilaian	: 2025	
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah	
	: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah	
urusan pemerintah	: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	tambahkan pemda, isi celah pengendalian

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Pengendalian yang sudah ada		Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu
			Uraian	E/KE/TE			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Potensi Menurunnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	RSO.26.31.23.01	Adanya penetapan harga TBS secara berkala satu bulan sekali, karena industri yang paling banyak ada di Provinsi Bengkulu adalah Industri CPO berbahan baku kelapa sawit	KE	koordinasi lintas sektor mengenai perkembangan harga sawit sebagai bahan baku industri CPO	Menginstruksikan masing-masing OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan bersama harga TBS melalui pemantauan langsung, surat menyurat, Zoom Meeting. Jika perusahaan membeli TBS dibawah harga standar maka petani tidak menjual sawitnya, sehingga volume produksi	setiap bulan
2	Potensi Jumlah perusahaan industri besar tidak bertambah	RSO.25.31.23.02	Rekomendasi teknis lapangan untuk penerbitan izin industri yang menjadi kewenangan propinsi	KE	koordinasi lintas sektor mengenai potensi indutri baru	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Disperindag Kab/Kota, perusahaan yang bersangkutan, dan OPD lainnya terkait	TW II, TIII, TW IV
3	Potensi menurunnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	RSO.25.31.23.04	Memperlancar arus barang dan jasa di Provinsi Bengkulu	KE	Langsung melakukan tindak lanjut jika terjadi hambatan arus barang dan jasa ataupun ketika terjadi kelangkaan barang bersama sektor terkait	Berkoordinasi lintas sektor Kab/Kota dan terjun langsung memastikan agar proses arus barang dan jasa berjalan lancar di Provinsi Bengkulu. Selain itu, melakukan rapat lintas sektor terkait inflasi daerah, dan memastikan stabilitas harga maupun ketersediaan barang dan langkah-langkah penanggulangan inflasi seperti operasi pasar dan menindaklanjuti kelangkaan barang	TW I, TW II, TIII, TW IV
II.	Risiko Strategis OPD						
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.01	Menyusun pelaporan sektor industri besar secara berkala setiap tahun	KE	Monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan bersama harga TBS melalui surat menyurat, Zoom Meeting. Jika perusahaan membeli TBS dibawah harga standar maka petani tidak menjual sawitnya, sehingga nilai produksi menurun	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas	TW II, TIII, TW IV
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan Rendah	RSO.26.31.23.02	Menyusun pelaporan sektor industri besar secara berkala setiap tahun termasuk data industri pengolahan	KE	koordinasi lintas sektor mengenai potensi dan perkembangan indutri pengolahan	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas, terutama perusahaan industri pengolahan agar diketahui pertumbuhan dan perkembangannya	TW II, TIII, TW IV
3	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.03	Melakukan operasi pasar murah	KE	Mengikuti Pengawasan rutin secara berkala yang dilaksanakan lintas sektor terutama oleh satgas (pihak berwenang) yang bisa melaksanakan tindakan kepada pedagang-pedagang nakal	Melakukan operasi pasar murah secara berkelanjutan terutama ketika harga bapokting meningkat pada perayaan hari besar keagamaan	TW I, TW II dan TW IV

II.	Risiko Operasi OPD						
1	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.01	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota dan dari aplikasi SIINas	E	membuat matriks kegiatan dan melakukan pemetaan perusahaan yang memang perlu di data	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV
2	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.02	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota dan dari aplikasi SIINas	E	membuat matriks kegiatan dan melakukan pemetaan perusahaan yang memang perlu di data	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV
3	Lambatnya Pelaporan dan update data IKM oleh Disperindag Kabupaten/Kota	ROO.26.31.23.03	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota	E	Memberikan honor kepada tenaga teknis di Kabupaten/Kota untuk pengumpulan data maka perlu tambahan anggaran	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	TW II, TW III dan TW IV
4	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data IKM di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.04	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota	E	membuat matriks kegiatan dan melakukan pemetaan IKM yang mudah untuk di data	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	TW II, TW III dan TW IV
5	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.05	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota dan dari aplikasi SIINas	E	membuat matriks kegiatan dan melakukan pemetaan perusahaan yang memang perlu di data	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV
6	Lambatnya Pelaporan dan update data Perusahaan pada Aplikasi SIINas	ROO.26.31.23.06	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota dan dari aplikasi SIINas	E	membuat matriks kegiatan dan melakukan pemetaan perusahaan yang memang perlu di data	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV
7	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data Perusahaan Sedang Besar di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.07	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota dan dari aplikasi SIINas	E	membuat matriks kegiatan dan melakukan pemetaan perusahaan yang memang perlu di data	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV
8	Belum adanya pasar lelang Komoditas di Provinsi Bengkulu dan tidak ada data Pengguna Pasar Lelang Komoditas	ROO.26.31.23.08				Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	TW IV
9	Lambatnya Pelaporan dan update data harga Bapokting yang disampaikan petugas dari Dinas Perdagangan	ROO.26.31.23.09	Pemantauan laporan dari Dinas kabupaten/kota	E	Memberikan honor kepada tenaga teknis di Kabupaten/Kota maka perlu tambahan anggaran	Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	setiap bulan
10	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan dan kurangnya anggaran yang tersedia padahal kegiatan sudah terjadwal	ROO.26.31.23.10	menyusun rencana arus kas sesuai target	E	Mengajukan proposal dukungan Operasi Pasar ke stakeholder lainnya contohnya BI dan Bank Bengkulu	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW I, TW II, TW III dan TW IV

11	Kurangnya pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan banyak beredar barang yang tidak ada SNI	ROO.26.31.23.11	Melakukan pengawasan rutin	E	Mengikuti Pengawasan rutin secara berkala yang dilaksanakan lintas sektor terutama oleh satgas (pihak berwenang) yang bisa melaksanakan tindakan kepada pedagang-pedagang nakal misalnya BPOM	Himbauan kepada pedagang untuk menjual barang yang SNI	TW I, TW II, TW III dan TW IV
12	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan	ROO.26.31.23.12	menyusun rencana arus kas sesuai target	E	mengajukan proposal dukungan kegiatan ke lembaga PPMB pusat untuk fasilitasi sertifikasi kalibrasi alat-alat kalibrasi milik PPMB Provinsi Bengkulu	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV
13	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan	ROO.26.31.23.13	Memetakan produk potensial dan perusahaan yang akan diuji produknya	E	mengajukan proposal dukungan kegiatan ke lembaga PPMB pusat menyiapkan modul panduan pengujian untuk perusahaan-perusahaan agar tertarik untuk menguji mutu produknya di PPMB	Berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia dan mau menguji produk yang mereka olah/produksi	TW II, TW III dan TW IV
14	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji	ROO.26.31.23.14	Mengatur seefisien mungkin penggunaan peralatan dan bahan uji	E	mengajukan proposal dukungan kegiatan ke lembaga PPMB pusat untuk bantuan alat-alat kalibrasi PPMB Provinsi Bengkulu	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV
15	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.15	Melakukan perencanaan penyusunan anggaran lebih cermat lagi	KE	Menjadi narahubung bagi Pelaku Ekspor untuk meletakkan produknya yang akan diekspor ke Ina Ekspor Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional kementerian Perdagangan RI untuk pameran komoditi ekspor	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV
16	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.16	Melakukan perencanaan penyusunan anggaran lebih cermat lagi	KE	Menjadi narahubung bagi Pelaku Ekspor untuk meletakkan produknya yang akan diekspor ke Ina Ekspor Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional kementerian Perdagangan RI untuk pameran komoditi ekspor	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Bengkulu					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: - Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyediaan Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menginstruksikan masing-masing OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan bersama harga TBS melalui pemantauan langsung, surat menyurat, Zoom Meeting	pemberian instruksi, surat dan aplikasi zoom	surat menyurat dinas, Rapat monitoring evaluasi melalui zoom meeting, pemantauan lapangan	Pemda, OPD, Perusahaan	setiap bulan		
2	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti perusahaan yang bersangkutan, dan OPD lainnya terkait	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV		
3	Berkoordinasi lintas sektor Kab/Kota dan terjun langsung memastikan agar proses arus barang dan jasa berjalan lancar di Provinsi Bengkulu. Selain itu, melakukan rapat lintas sektor terkait inflasi daerah, dan memastikan stabilitas harga maupun ketersediaan barang dan langkah-langkah penanggulangan inflasi seperti operasi pasar dan menindaklanjuti kelangkaan barang	Koordinasi dan konsultasi, Pemantauan lapangan dan rapat	Koordinasi dan konsultasi, Pemantauan lapangan dan rapat	Pemda, OPD	TW I, TW II, TIII, TW IV		
4	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas	surat, zoom meeting, kordinasi konsultasi	surat menyurat dinas, Zoom Meeting	OPD	TW II, TIII, TW IV		
5	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas, terutama perusahaan industri pengolahan agar diketahui pertumbuhan dan perkembangannya	surat, zoom meeting, kordinasi konsultasi	surat menyurat dinas, Zoom Meeting	OPD	TW II, TIII, TW IV		
6	Melakukan operasi pasar murah secara berkelanjutan terutama ketika harg bapakting menngkat pada perayaan hari besar keagamaan	Operasi Pasar	bazar pasar murah	Masyarakat	TW I, TW II dan TW IV		
7	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV		

8	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV		
9	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV		
10	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV		
11	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV		
12	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV		
13	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV		
14	Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV		
15	Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV		
16	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN		
17	Himbauan kepada pedagang untuk menjual barang yang SNI	Koordinasi dan pemantauan lapangan	Koordinasi dan pemantauan lapangan	OPD dan pedagang	TW I, II, TW III dan TW IV		
18	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN		
19	Berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia dan mau menguji produk yang mereka olah/produksi	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD dan Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV		
20	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN		
21	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN		
22	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Bengkulu				
Tahun Penilaian		: 2026				
Tujuan Strategis		: - Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yangj Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menginstruksikan masing-masing OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan bersama harga TBS melalui pemantauan langsung, surat menyurat, Zoom Meeting	pemberian instruksi, surat dan aplikasi zoom	Pemda, OPD, Perusahaan	setiap bulan	setiap bulan	
2	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti perusahaan yang bersangkutan, dan OPD lainnya terkait	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV	TW II	
3	Berkoordinasi lintas sektor Kab/Kota dan terjun langsung memastikan agar proses arus barang dan jasa berjalan lancar di Provinsi Bengkulu. Selain itu, melakukan rapat lintas sektor terkait inflasi daerah, dan memastikan stabilitas harga maupun ketersediaan barang dan langkah-langkah penanggulangan inflasi seperti operasi pasar dan menindaklanjuti kelangkaan barang	Koordinasi dan konsultasi, Pemantauan lapangan dan rapat	Pemda, OPD	TW I, TW II, TIII, TW IV	TW I dan TW II	
4	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas	surat, zoom meeting, kordinasi konsultasi	OPD	TW II, TIII, TW IV	TW II	
5	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas, terutama perusahaan industri pengolahan agar diketahui pertumbuhan dan perkembangannya	surat, zoom meeting, kordinasi konsultasi	OPD	TW II, TIII, TW IV	TW I dan TW II	

6	Melakukan operasi pasar murah secara berkelanjutan terutama ketika harga bapokting meningkat pada perayaan hari besar keagamaan	Operasi Pasar	Masyarakat	TW I, TW II dan TW IV	TW I, II, III dan IV	
7	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV	TW I I	
8	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV	TW II	
9	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV	TW III	
10	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV	TW III	
11	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV	TW II	
12	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV	TW II	
13	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Koordinasi dan konsultasi	Pemda, OPD, Perusahaan	TW II, TIII, TW IV	TW II	
14	Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV		belum dilaksanakan koordinasi karena tidak ada data pasar lelang dan kurangnya anggaran untuk
15	Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	Koordinasi dan konsultasi	OPD	TW II, TW III dan TW IV	setiap bulan	
16	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN	TW I, TW II, TW III dan TW IV	
17	Himbauan kepada pedagang untuk menjual	Koordinasi dan pemantauan lapangan	OPD dan pedagang			

	barang yang SNI			TW I, II, TW III dan TW IV	TW I dan II	
18	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN	TW II, TW III dan TW IV	
19	Berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia dan mau menguji produk yang mereka olah/produksi	Koordinasi dan konsultasi	OPD dan Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV	TW III	
20	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN	TW II, TW III dan TW IV	
21	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN	TW II, TW III dan TW IV	
22	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Koordinasi dan konsultasi	OPD	1 TAHUN	TW II, TW III dan TW IV	

Bengkulu, 31 Januari 2026

Kepala Dinas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Bengkulu


DESMAN SIBORO, SH
 Pembina Tk. 1
 NIP. 19700110 201001 1 003

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bengkulu Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Penilaian : 2025 urusan pemerintah : Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan										
No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	kejadian risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	sebab	dampak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Risiko Strategis Pemda									
1	Potensi Menurunnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	RSO.26.31.23.01	setiap bulan	Penurunan kualitas bahan baku industri pengolahan (TBS sawit buah matang busuk), Menurunnya permintaan buyer untuk ekspor CPO, sehingga jumlah produksipun turun	Semakin Menurunnya PAD Provinsi Bengkulu dari sektor industri	setiap bulan dilakukan pembahasan terkait kesepakatan bersama harga TBS, dan tindaklanjut yang dilakukan OPD-OPD terkait	Menginstruksikan masing-masing OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan bersama harga TBS melalui pemantauan langsung, surat menyurat, Zoom Meeting. Jika perusahaan membeli TBS dibawah harga standar maka petani tidak menjual sawitnya, sehingga volume produksi menurun	setiap bulan		
2	Potensi Jumlah perusahaan industri besar tidak bertambah	RSO.25.31.23.02	TW II	Semakin Terbatasnya Lahan/Lokasi Untuk Pembangunan Industri pengolahan yang ada dan belum terbentuknya kawasan industri Pelabuhan Pulau Baii	Semakin Menurunnya Kinerja Pelaku Usaha Industri yang ada	sudah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnya dengan OPD, bersurat dengan perusahaan	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Disperindag Kab/Kota, perusahaan yang bersangkutan, dan OPD lainnya terkait	TW II, TIII, TW IV		
3	Potensi menurunnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	RSO.25.31.23.04	TW I dan TW II	Inflasi harga yang tidak didukung daya beli masyarakat. Selain itu komoditi ekspor Provinsi Bengkulu masih dalam bentuk barang mentah seperti cangkang sawit, batubara	Menurunnya kinerja perdagangan Provinsi Bengkulu	sudah dilakukan koordinasi lintas sektor Kab/Kota dan terjun langsung memastikan agar proses arus barang dan jasa berjalan lancar di Provinsi Bengkulu	Berkoordinasi lintas sektor Kab/Kota dan terjun langsung memastikan agar proses arus barang dan jasa berjalan lancar di Provinsi Bengkulu. Selain itu, melakukan rapat lintas sektor terkait inflasi daerah, dan memastikan stabilitas harga maupun ketersediaan barang dan langkah-langkah penanggulangan inflasi seperti operasi pasar dan menindaklanjuti kelangkaan barang	TW I, TW II, TIII, TW IV		
	Risiko Strategis OPD									
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.01	TW II	Tidak adanya pembangunan dan pengembangan industri baru dan existing dan belum adanya hilirisasi industri pengolahan	Menurunnya kapasitas Produksi Petani, Pelaku Usaha Industri, Pertambangan dan peternakan berbasis ekspor	Sudah Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas	TW II, TIII, TW IV		

2	Rasio PDRB Industri Pengolahan Rendah	RSO.26.31.23.02	TW I dan TW II	belum adanya hilirisasi industri pengolahan yang memberi nilai tambah produk industri pengolahan selain CPO	Menurunnya kapasitas Produksi Petani, Pelaku Usaha Industri, Pertambangan dan peternakan berbasis ekspor	Sudah Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas, terutama perusahaan industri pengolahan agar diketahui pertumbuhan dan perkembangannya	Bersurat secara resmi kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan secara berkala di SIINas, terutama perusahaan industri pengolahan agar diketahui pertumbuhan dan perkembangannya	TW II, TW III, TW IV		
3	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Rendah	RSO.26.31.23.03	TW I, II, III dan IV	Kenaikan harga yang tidak diimbangi kenaikan penghasilan masyarakat. Selain itu komoditi ekspor provinsi Bengkulu masih dalam bentuk barang mentah seperti cangkang sawit, batubara	Nilai investasi dan proses produksi industri tidak mencapai target	sudah Melakukan operasi pasar murah secara berkelanjutan terutama ketika harga bapakting meningkat pada perayaan hari besar keagamaan seperti di Bulan Ramadhan, Iddul Adha, Natal dan Tahun Baru ataupun event-event lainnya	Melakukan operasi pasar murah secara berkelanjutan terutama ketika harga bapakting meningkat pada perayaan hari besar keagamaan	TW I, TW II dan TW IV		
III										
1	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.01	TW I I	kurangnya anggaran untuk pengawasan dan pengambilan data di lapangan akibat dari efisiensi anggaran	terhambatnya proses pelaksanaan penyusunan dokumen	Sudah Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV		
2	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.02	TW II	kurangnya anggaran untuk pemantauan dan pengambilan data di lapangan akibat dari efisiensi anggaran	terhambatnya proses pelaksanaan penyusunan dokumen	Sudah Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV		
3	Lambatnya Pelaporan dan update data IKM oleh Disperindag Kabupaten/Kota	ROO.26.31.23.03	TW III	Dokumen Pendukung belum tersedia secara tepat waktu	Proses Pelaporan menjadi terhambat untuk disampaikan	Sudah Berkoordinasi dengan bersurat dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	TW II, TW III dan TW IV		
4	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data IKM di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.04	TW III	Kurangnya anggaran untuk pemantauan ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu. Selain itu Kabupaten Kota kekurangan personal pengumpul data serta tidak ada anggaran pengumpulan data base IKM	Kurang optimalnya pemantauan Data IKM tidak terupdate pada SIINas, sehingga tidak optimal dalam penentuan strategi kebijakan industri Kecil Menengah di Provinsi Bengkulu	Sudah Berkoordinasi dengan bersurat dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data IKM	TW II, TW III dan TW IV		
5	dokumen tidak tersusun tepat waktu	ROO.26.31.23.05	TW II	kurangnya anggaran untuk pengawasan dan pengambilan data di lapangan akibat dari efisiensi anggaran, serta lambatnya perusahaan mengupdate data di SIINas untuk pemantauan habis masa berlaku izin perusahaan Industri	terhambatnya proses pelaksanaan penyusunan dokumen	Sudah Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV		

6	Lambatnya Pelaporan dan update data Perusahaan pada Aplikasi SIINas	ROO.26.31.23.06	TW II	Dokumen Pendukung belum tersedia secara tepat waktu	Proses Pelaporan menjadi terhambat untuk disampaikan	Sudah Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV		
7	Kurang maksimal dan cermatnya pengumpulan data Perusahaan Sedang Besar di Provinsi Bengkulu	ROO.26.31.23.07	TW II	Kurangnya anggaran untuk pemantauan ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu. Selain itu Kabupaten Kota kurang personal pengumpul data serta tidak ada anggaran pengumpulan data base Perusahaan Sedang Besar	Kurang optimalnya pemantauan Data Perusahaan Sedang Besar tidak terupdate pada SIINas, sehingga tidak optimal dalam penentuan strategi kebijakan industri Perusahaan Sedang Besar di Provinsi Bengkulu	Sudah Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	Berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu untuk pengumpulan dan pengambilan data Perusahaan	TW II, TW III dan TW IV		
8	Belum adanya pasar lelang Komoditas di Provinsi Bengkulu dan tidak ada data Pengguna Pasar Lelang Komoditas	ROO.26.31.23.08		Kurangnya anggaran untuk pemantauan dan pengambilan data ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu terkait pelaku usaha yang menggunakan pasar lelang komoditas	Kurang optimalnya pemantauan dan pengambilan data ke Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu terkait pelaku usaha yang menggunakan pasar lelang komoditas		Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	TW IV		belum dilaksanakan koordinasi karena tidak ada data pasar lelang dan kurangnya anggaran untuk kordinasi
9	Lambatnya Pelaporan dan update data harga Bapokting yang disampaikan petugas dari Dinas Perdagangan Kab/kota	ROO.26.31.23.09	setiap bulan	Jumlah petugas pemantauan harga Bapokting Terbatas dari Dinas Perdagangan Kab/kota	Terlambatnya update data dan penyampaian laporan data harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota untuk penyampaian harga Bapokting	Berkoordinasi dengan bidang Perdagangan Disperindag Kab/Kota	setiap bulan		
10	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan dan kurangnya anggaran yang tersedia padahal kegiatan sudah terjadwal	ROO.26.31.23.10	TW I, TW II, TW III dan TW IV	Kurangnya perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Kas pada Kegiatan	terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal pasar murah yaitu pada bulan Ramadhan bulan Maret 2026	Sudah dilakukan koordinasi dengan Bidang Terkait yaitu Sub Bagian Keuangan dan juga BPKAD	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW I, TW II, TW III dan TW IV		
11	Kurangnya pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan banyak beredar barang yang tidak ada SNI	ROO.26.31.23.11	TW I dan II	Keterbatasan jumlah produk yang dipantau dan Kurang kesadaran pedagang untuk menjual produk-produk yang sudah SNI	Kurang optimalnya pengawasan barang beredar sehingga masih banyak produk yang tidak ber SNI beredar di masyarakat	Sudah dilakukan pengawasan barang beredar sekaligus Himbauan kepada pedagang untuk menjual barang yang SNI	Himbau kepada pedagang untuk menjual barang yang SNI	TW I, TW II, TW III dan TW IV		

12	Adanya Keterlambatan Pengajuan pencairan dana Kegiatan	ROO.26.31.23.12	TW II, TW III dan TW IV	Kurangnya perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Kas pada Kegiatan	terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan masa kadaluarsa sertifikat kalibrasi	Sudah dilakukan koordinasi dengan Bidang Terkait yaitu Sub Bagian Keuangan	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV		
13	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan	ROO.26.31.23.13	TW III	Kurangnya anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk ke perusahaan-perusahaan yang mengolah komoditi unggulan	Jumlah komoditi unggulan yang diuji terbatas dan sertifikat yang diterbitkan juga sedikit	Sudah dilakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia dan mau menguji produk yang mereka olah/produksi	Berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia dan mau menguji produk yang mereka olah/produksi	TW II, TW III dan TW IV		
14	Efisiensi anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji	ROO.26.31.23.14	TW II, TW III dan TW IV	Kurangnya anggaran untuk melakukan pengujian mutu produk di Laboratorium PPMB karena keterbatasan peralatan dan bahan uji	Jumlah komoditi unggulan yang diuji terbatas dan sertifikat yang diterbitkan juga sedikit	Sudah dilakukan koordinasi dengan Bidang Terkait yaitu Sub Bagian Keuangan	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV		
15	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.15	TW II, TW III dan TW IV	kurangnya anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha ekspor yang mendapat fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan sangat terbatas	Sudah dilakukan koordinasi dengan Bidang Terkait yaitu Sub Bagian Keuangan	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV		
16	Kurang cermatnya perencanaan anggaran untuk fasilitasi pelaku usaha dalam Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	ROO.26.31.23.16	TW II, TW III dan TW IV	kurangnya anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha ekspor yang mendapat fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan sangat terbatas	Sudah dilakukan koordinasi dengan Bidang Terkait yaitu Sub Bagian Keuangan	Berkoordinasi dengan bidang terkait	TW II, TW III dan TW IV		